

MANAJEMEN PERAN PENDAMPING PENGAWAS SEKOLAH DALAM MEMBANTU GURU SEKOLAH DASAR MENANGANI SISWA INKLUSI DI KECAMATAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA

Management of the Role of School Supervisor Assistants in Helping Elementary School Teachers Handle Inclusion Students in Marabahan District, Barito Kuala Regency

Submit Tgl.: 28-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 30-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 31-Agustus-2026

Patmawati

Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al Banjari,
Banjarmasin, Indonesia

*email:

patma.sdnmrb2@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah terhadap guru SD dalam menangani siswa inklusi di Kecamatan Marabahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru; observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan pendampingan; serta dokumentasi berupa laporan supervisi dan data siswa inklusi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola dan makna dari fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendampingan pengawas sekolah dalam membantu guru menangani siswa inklusi di Kecamatan Marabahan masih menghadapi hambatan signifikan, terutama terkait rendahnya kompetensi pedagogik guru yang mayoritas tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus serta keterbatasan sarana prasarana penunjang yang aksesibel. Pendampingan yang dilakukan pengawas saat ini masih dominan pada aspek administratif daripada bantuan teknis instruksional yang inovatif, ditambah dengan sistem evaluasi dan monitoring yang belum spesifik dalam mengukur perkembangan individual siswa inklusi.

Kata Kunci:

Pengawas Sekolah
Pendidikan Inklusif
Pendampingan Guru
Dst

Keywords:

School Superintendent
Inclusive Education
Teacher Assistance
Etc

Abstract

This study aims to identify and analyze various problems in the implementation of school supervisor assistance to elementary school teachers in dealing with inclusion students in Marabahan District. This study uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through interview techniques with school supervisors, principals, and teachers; direct observation of learning and mentoring activities; and documentation in the form of supervision reports and inclusion student data. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions to find patterns and meanings of the phenomenon being studied. The results of the study show that the role of school supervisor assistance in helping teachers deal with inclusion students in Marabahan District still faces significant obstacles, especially related to the low pedagogic competence of teachers, the majority of whom do not have a special educational background and limited accessible supporting infrastructure. The assistance provided by the supervisor is currently still dominant in the administrative aspect rather than innovative instructional technical assistance, coupled with an evaluation and monitoring system that is not yet specific in measuring the individual development of inclusive students.

Cara mengutip Patmawati. (2026). Manajemen Peran Pendamping Pengawas Sekolah dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala. *EduCurio: Education Curiosity*, 4(3), 541–555. <https://doi.org/10.71456/ecu.v4i3.2641>

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa yang berperan penting dalam

mencetak generasi cerdas, berakarakter, dan berdaya saing (Sanga & Wangdra, 2023:84). Hak memperoleh pendidikan yang layak bagi setiap warga negara telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 31 dan ditegaskan

kembali melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, sosial, atau ekonomi berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu (Rahmani, 2022:78). Komitmen global ini diperkuat melalui *Salamanca Statement* tahun 1994 yang menegaskan pentingnya sekolah reguler menampung semua anak berdasarkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi (Rilci et al., 2024:42). Landasan tersebut melahirkan konsep pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pembelajaran yang menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya.

Secara operasional, regulasi nasional dan daerah memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (2) serta Kepmendikbudristek Nomor 56/M/2022, satuan pendidikan didorong untuk mengembangkan kurikulum adaptif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menegaskan kewajiban setiap satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak tanpa diskriminasi. Regulasi-regulasi ini menjadi landasan yuridis bagi sekolah dasar untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang ramah anak dan berkeadilan bagi seluruh siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di tingkat satuan pendidikan membawa konsekuensi pada tingginya tuntutan kesiapan sekolah dan tenaga pendidik. Oktaviani (2020:58) menjelaskan bahwa guru dituntut memiliki keterampilan pedagogis yang adaptif, pemahaman mendalam tentang jenis kebutuhan khusus, serta kemampuan merancang pembelajaran yang mengakomodasi berbagai perbedaan siswa. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa guru sering mengalami kendala dalam menyesuaikan kurikulum, menyusun metode evaluasi yang adil, serta menghadapi

keterbatasan sarana prasarana maupun guru pendamping khusus. Tanpa adanya dukungan yang memadai, guru berpotensi mengalami kesulitan dalam merespons kebutuhan belajar siswa inklusi secara optimal.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pengawas sekolah memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan inklusif dengan praktik pembelajaran di kelas. Melalui kegiatan supervisi akademik dan manajerial, pengawas berperan aktif sebagai pembina, pendamping, dan konsultan yang memberikan bimbingan teknis serta solusi atas kendala guru. Prayoga et al. (2025:34) menyatakan bahwa pendampingan intensif dan berkesinambungan dari pengawas sekolah terbukti mampu meningkatkan kompetensi profesional guru dalam memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus, menyusun perangkat pembelajaran yang tepat, serta menciptakan suasana kelas yang inklusif dan kondusif.

Kondisi nyata tersebut tampak di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang telah menetapkan 15 sekolah dasar sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan total 37 siswa inklusi. Berdasarkan data lapangan, konsentrasi siswa inklusi terbanyak terdapat di tiga sekolah, yaitu SDN Marabahan 3, SDN Ulu Benteng 4, and SDN Ulu Benteng 5 yang masing-masing mendidik lima siswa inklusi, sementara sebagian kecil wilayah lainnya bersinggungan langsung dengan SLBN Marabahan. Beragamnya kebutuhan khusus siswa seperti hambatan intelektual, gangguan komunikasi, autisme, dan gangguan perilaku di sekolah-sekolah tersebut menuntut adanya peran optimal dari pengawas sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana efektivitas pendampingan pengawas dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh

pemahaman yang mendalam mengenai manajemen peran pendampingan pengawas sekolah dalam membantu guru sekolah dasar menangani siswa inklusi. Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk menggali data secara detail melalui kata-kata, tindakan nyata, serta dokumen pendukung yang diperoleh langsung dari informan di lapangan. Jenis deskriptif difungsikan agar peneliti mampu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi objektif terkait bentuk pendampingan yang diberikan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan kompetensi guru.

Lokasi penelitian ditetapkan pada satuan pendidikan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, dengan fokus informan yang terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, serta guru pendamping siswa inklusi dari tiga sekolah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus terbanyak. Pengumpulan data ditempuh melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam guna menggali informasi pengalaman dan kendala informan, observasi langsung untuk memantau aktivitas pembelajaran dan interaksi di kelas, serta studi dokumentasi untuk mengumpulkan catatan supervisi maupun arsip sekolah. Seluruh rangkaian proses pengumpulan data tersebut diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber guna membandingkan informasi antarpihak dan menghindari subjektivitas penarikan kesimpulan.

Analisis data dilaksanakan mengikuti model interaktif yang mencakup tiga tahapan utama secara berkesinambungan, yaitu reduksi data untuk menyaring dan memfokuskan informasi penting, penyajian data dalam bentuk uraian terstruktur, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab fokus permasalahan penelitian. Langkah analisis ini dirancang agar pola dan makna dari fenomena manajemen pendampingan pengawas sekolah dapat diinterpretasikan secara komprehensif

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi Di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Pelaksanaan pendampingan oleh pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelayanan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Hambatan utama yang muncul berkaitan dengan keterbatasan kompetensi guru, minimnya sarana prasarana penunjang, serta kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan khusus siswa.

Kemampuan guru dalam menangani siswa inklusi dinilai belum maksimal karena kurangnya tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan luar biasa, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Belum maksimal karena guru pendamping khusus masih kurang, dan walaupun ada latar belakang pendidikan hanya mengikuti pelatihan yang terbatas (dari guru kelas bukan PLB). Yang seharusnya guru perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan inklusi, termasuk strategi pembelajaran yang berbeda, teknik asesmen, dan manajemen kelas yang inklusif."

Fasilitas pendukung di sekolah masih sangat terbatas terutama pada aspek aksesibilitas fisik dan media pembelajaran khusus, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran inklusi secara umum sudah tersedia, namun masih perlu penguatan. Beberapa fasilitas dasar seperti ruang kelas, media pembelajaran, dan aksesibilitas dasar sudah terpenuhi, tetapi sarana khusus seperti alat bantu belajar, ruang layanan khusus, dan fasilitas ramah disabilitas"



masih perlu ditingkatkan agar layanan inklusi dapat berjalan lebih optimal."

Keterbatasan kompetensi guru dan ketiadaan fasilitas pendukung menjadi kendala utama dalam proses belajar mengajar harian, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan guru yang dilatih oleh pemerintah dan fasilitas yang mendukung seperti alat bantu dan media pembelajaran dan kurangnya pemahaman dari masyarakat masalah kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif, minimnya pendanaan dan tantangan dalam penilaian serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat."

Sarana prasarana yang tidak memadai mengakibatkan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus tidak dapat berjalan sesuai standar, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasana yang sangat masih kurang memadai terhadap melayani anak Inklusi."

Masalah sosial seperti stigma dari lingkungan dan kurangnya dukungan orang tua turut memperumit penanganan siswa di sekolah, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Kendala utama menangani siswa inklusi meliputi: kurangnya kompetensi guru keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kurikulum yang belum adaptif, stigma sosial, kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat."

Pengetahuan guru yang terbatas mengenai karakteristik spesifik siswa inklusi membuat proses pendampingan pengawas menjadi sangat krusial namun sulit direalisasikan sepenuhnya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai."

Kurangnya dukungan fasilitas fisik secara langsung menyebabkan guru kesulitan dalam mengatur proses belajar yang efektif di kelas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Keterbatasan fasilitas dan keterbatasan pengetahuan tentang siswa inklusi. Kurang mendukung sehingga kesulitan dalam proses belajar."

Kenyataan di lapangan menunjukkan kemiripan yang nyata antara pernyataan para informan dengan situasi riil yang terpantau selama penelitian. Berbagai temuan wawancara tersebut sejalan dengan hasil observasi peneliti yang memperlihatkan bahwa ruang kelas masih bersifat konvensional tanpa alat peraga khusus, guru cenderung kesulitan membagi fokus antara siswa reguler dan siswa inklusi, serta belum tersedianya jalur akses ramah disabilitas yang memadai di lingkungan sekolah. Kondisi objektif ini mengonfirmasi bahwa permasalahan utama dalam pendampingan pendidikan inklusi memang berakar pada keterbatasan sarana dan kompetensi teknis sumber daya manusia di lapangan.

Kompetensi dan Pemahaman Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan pendampingan di Kecamatan Marabahan berpusat pada rendahnya kompetensi pedagogik khusus dan pemahaman mendalam guru mengenai karakteristik siswa inklusi. Keterbatasan latar belakang pendidikan luar biasa di kalangan tenaga pendidik mengakibatkan proses adaptasi kurikulum dan teknik asesmen tidak berjalan optimal, sehingga peran pengawas dalam memberikan penguatan kompetensi menjadi sangat berat di tengah minimnya pelatihan formal.

Kapasitas guru kelas dalam memberikan layanan khusus masih dianggap belum memenuhi standar ideal pendidikan inklusi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Belum maksimal karena guru pendamping khusus masih kurang, dan walaupun ada latar belakang pendidikan hanya mengikuti pelatihan yang terbatas (dari guru kelas bukan PLB). Yang seharusnya guru perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang pendidikan inklusi, termasuk strategi pembelajaran yang berbeda, teknik asesmen, dan manajemen kelas yang inklusif".

Upaya penyesuaian pembelajaran sebenarnya sudah dilakukan oleh tenaga pendidik namun masih membutuhkan banyak bimbingan teknis yang mendalam, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Guru dinilai mampu menangani siswa inklusi, terlihat dari upaya menyesuaikan pembelajaran dan memberikan perhatian sesuai kebutuhan siswa, meskipun beberapa aspek masih memerlukan penguatan".

Pemahaman masyarakat dan guru terhadap kurikulum yang adaptif masih menjadi kendala besar yang menghambat efektivitas pendampingan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan guru yang dilatih oleh pemerintah dan fasilitas yang mendukung seperti alat bantu dan media pembelajaran dan kurangnya pemahaman dari masyarakat masalah kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif, minimnya pendanaan dan tantangan dalam penilaian serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat".

Pembinaan yang berkelanjutan terhadap tenaga pendidik menjadi prioritas utama untuk mengatasi

ketidaksiapan kompetensi di lapangan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Memastikan tenaga pendidik agar di latih dengan baik".

Rendahnya kompetensi guru diperparah oleh stigma sosial dan kurangnya pemahaman dari pihak keluarga siswa itu sendiri, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Kendala utama menangani siswa inklusi meliputi: kurangnya kompetensi guru keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kurikulum yang belum adaptif, stigma sosial, kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat".

Penguasaan materi inklusi di beberapa sekolah sudah mulai terbentuk melalui pelatihan tingkat daerah meskipun frekuensinya masih terbatas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru 1, yang mengatakan bahwa:

"Cukup bagus dalam menangani siswa Inklusi karena sebagian sudah pernah mengikuti pelatihan baik tingkat kabupaten maupun provinsi".

Ketidaktahuan mengenai cara menangani kebutuhan spesifik setiap anak inklusi seringkali membuat guru merasa tidak berdaya tanpa arahan langsung dari pengawas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru 1, yang mengatakan bahwa:

"Keterbatasan fasilitas dan keterbatasan pengetahuan tentang siswa inklusi".

Situasi yang ditemukan di lapangan memperlihatkan kesesuaian antara pengakuan para informan dengan kondisi nyata yang teramati secara langsung. Sebagian besar guru masih menggunakan metode mengajar yang seragam bagi seluruh siswa karena kurangnya pemahaman teknis mengenai



modifikasi materi bagi anak berkebutuhan khusus. Fakta ini membuktikan bahwa gap antara tuntutan tugas dan kompetensi guru memang menjadi persoalan mendasar yang mengharuskan adanya intensitas pendampingan yang lebih tinggi dari pengawas sekolah.

Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Koordinasi dan kolaborasi dalam pendampingan pendidikan inklusi di Kecamatan Marabahan masih menghadapi hambatan struktural maupun teknis yang mempengaruhi sinkronisasi program antara pengawas, pihak sekolah, dan orang tua. Meskipun upaya kerja sama telah dirancang, tantangan nyata muncul dalam hal keterlibatan pihak eksternal serta pemahaman bersama mengenai kurikulum adaptif, yang seringkali menyebabkan proses penanganan siswa dengan kebutuhan khusus menjadi kurang terpadu.

Peran pengawas sebagai jembatan penghubung dengan tenaga ahli masih memerlukan penguatan agar intervensi khusus dapat terealisasi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas berperan sebagai penghubung antara sekolah dengan pihak eksternal seperti tenaga medis, psikolog, terapis, atau lembaga layanan disabilitas, untuk penanganan kasus yang membutuhkan intervensi khusus. Kerja sama ini melibatkan pengawas, kepala sekolah guru, orang tua dan masyarakat agar sekolah tidak merasa sendirian dalam menangani siswa inklusi."

Sinkronisasi data dan kebutuhan riil di lapangan antara sekolah dan pengawas menjadi poin krusial yang harus terus diperbaiki secara rutin, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Bentuk kerja sama dilakukan melalui koordinasi rutin, sekolah menyediakan data dan kebutuhan siswa, sementara pengawas memberikan arahan serta monitoring. Koordinasi melibatkan pengawas sekolah, kepala sekolah, guru kelas, serta guru pendamping khusus bila tersedia untuk memastikan layanan inklusi sesuai standar."

Kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya kolaborasi dengan pihak keluarga masih menjadi faktor penghambat yang signifikan bagi guru di kelas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat masalah kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif serta tantangan dalam kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat. Pengawas dan kepala sekolah mengadakan rapat untuk mensosialisasikan pendidikan inklusif pada seluruh lapisan masyarakat baik lingkungan pengambil kebijakan, sekolah, masyarakat dan keluarga."

Pelatihan bagi tenaga pendidik merupakan bentuk kolaborasi yang harus dijamin pelaksanaannya secara konsisten untuk menjaga mutu layanan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Memastikan tenaga pendidik agar di latih dengan baik melalui kerja sama yang melibatkan pengawas, guru tenaga pendidik, orang tua dan siswa."

Rendahnya dukungan dari lingkungan sosial dan orang tua seringkali membuat rencana program inklusi yang telah disusun tidak berjalan efektif, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Kendala utama meliputi stigma sosial, kurangnya dukungan orang tua dan masyarakat. Koordinasi dilakukan sesering mungkin melalui rapat, komunikasi"

lisan/tertulis, perencanaan dan kolaborasi untuk memastikan tujuan tercapai efektif."

Pola komunikasi yang dibangun antar pemangku kepentingan masih didominasi oleh metode diskusi sederhana tanpa protokol yang ketat, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Bentuk kerja sama dilakukan dengan cara tukar pendapat atau sharing antara pengawas, kepek, guru dan orang tua atau masyarakat."

Intensitas komunikasi yang hanya dilakukan dalam periode tertentu terkadang menghambat penyelesaian masalah yang bersifat mendesak, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Sering berkomunikasi dengan pengawas sebulan sekali dalam bentuk wawancara untuk penanganan siswa inklusi."

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang menemukan bahwa koordinasi di lapangan masih bersifat insidental dan belum terlembaga secara kuat. Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua seringkali hanya terjadi saat muncul masalah perilaku pada siswa, sementara pertemuan rutin yang melibatkan pengawas dan tenaga ahli sangat jarang terlihat. Realitas di lokasi penelitian mengonfirmasi bahwa keterbatasan frekuensi pertemuan tatap muka dan minimnya keterlibatan terapis atau psikolog secara langsung di sekolah menjadikan kolaborasi antarpihak masih berada pada tahap administratif, belum menyentuh aspek teknis penanganan anak berkebutuhan khusus secara holistik.

Permasalahan Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusi di Kecamatan Marabahan masih jauh

dari kategori ideal untuk mendukung proses pembelajaran yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus. Hambatan fisik berupa ketiadaan fasilitas ramah disabilitas serta keterbatasan media pembelajaran khusus menjadi kendala teknis yang mengharuskan pengawas sekolah bekerja ekstra dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi pengadaan kepada pihak terkait.

Fasilitas yang ada saat ini masih sangat minim terutama pada aspek aksesibilitas fisik dan media belajar yang bisa mengakomodasi kebutuhan spesifik siswa, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana sangat kurang terutama untuk aksesibilitas fisik dan yang ada adalah alat dan media pembelajaran itupun masih disesuaikan dengan kebutuhan siswa".

Kebutuhan akan alat bantu belajar dan ruang layanan khusus masih menjadi prioritas yang belum sepenuhnya terpenuhi di tingkat satuan pendidikan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran inklusi secara umum sudah tersedia, namun masih perlu penguatan. Beberapa fasilitas dasar seperti ruang kelas, media pembelajaran, dan aksesibilitas dasar sudah terpenuhi, tetapi sarana khusus seperti alat bantu belajar, ruang layanan khusus, dan fasilitas ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan agar layanan inklusi dapat berjalan lebih optimal".

Minimnya pendanaan berimbas langsung pada ketersediaan alat bantu yang seharusnya digunakan guru untuk mempermudah penyampaian materi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan guru yang dilatih oleh pemerintah dan fasilitas yang mendukung



seperti alat bantu dan media pembelajaran... minimnya pendanaan dan tantangan dalam penilaian serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan masyarakat".

Pelayanan terhadap siswa inklusi tidak dapat berjalan maksimal akibat infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya mendukung mobilitas dan kebutuhan mereka, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana yang sangat masih kurang memadai terhadap melayani anak Inklusi".

Ketiadaan ruang khusus bimbingan konseling dan media pembelajaran adaptif merupakan potret nyata keterbatasan sumber daya di lapangan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Kondisi sarana prasarana inklusi di sekolah: bervariasi, banyak yang masih terbatas dan belum memadai, seperti kurangnya aksesibilitas fisik, ruang, alat bantu, ruang khusus bimbingan konseling serta media".

Ketiadaan sarana pendukung yang memadai memaksa pihak sekolah untuk terus mengajukan permohonan bantuan secara administratif melalui arahan pengawas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Tidak ada sarana dan prasarana yang memadai. (Pengawas) membantu dengan cara memberi saran agar sekolah membuat permohonan ke Dinas yang terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai".

Kondisi sarana yang tidak mendukung menciptakan hambatan besar bagi guru dalam menjalankan instruksi pembelajaran yang inklusif setiap harinya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Kurang mendukung sehingga kesulitan dalam proses belajar. (Pengawas) membantu dengan cara memberi saran agar kita mengajukan ke dinas pendidikan".

Hasil observasi di lapangan memperkuat seluruh temuan wawancara yang menyatakan bahwa infrastruktur sekolah belum siap sepenuhnya. Tidak ada jalur landai (ramp) untuk pengguna kursi roda, toilet sekolah belum didesain ramah disabilitas, serta ketiadaan media belajar khusus seperti buku braille atau alat peraga sensorik di sekolah-sekolah dasar tersebut. Fakta objektif ini membuktikan bahwa permasalahan sarana dan prasarana bukan sekadar kekurangan administratif, melainkan hambatan nyata yang menghalangi hak siswa inklusi untuk mendapatkan lingkungan belajar yang setara dan mandiri.

Evaluasi dan Monitoring Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Kegiatan evaluasi dan monitoring oleh pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan merupakan tahap krusial untuk memastikan kualitas layanan pendidikan inklusi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan substansif. Pengawas dituntut untuk tidak hanya melakukan inspeksi administratif, tetapi juga harus memahami karakteristik spesifik siswa serta regulasi inklusi yang dinamis, sehingga umpan balik yang diberikan dapat benar-benar memperbaiki pola pengajaran guru di kelas secara holistik.

Prosedur pemantauan kinerja guru memerlukan instrumen yang mendalam untuk mengukur kesesuaian perangkat pembelajaran dengan kebutuhan siswa inklusi yang beragam, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Evaluasi kinerja guru dalam menangani siswa inklusi harus holistik, berfokus pada proses dan hasil, serta

dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bukan sekadar inspeksi. Langkah evaluasi meliputi pemahaman karakteristik siswa, kesesuaian RPP dengan modifikasi/adaptasi, pemanfaatan alat bantu, serta penggunaan teknik penilaian yang adaptif seperti portofolio".

Mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi di tingkat sekolah dilakukan melalui forum diskusi untuk merumuskan perbaikan layanan pembelajaran secara bersama-sama, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas menilai kemampuan guru dalam menyesuaikan metode, media, dan layanan sesuai kebutuhan siswa inklusi, lalu memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan. Hasil evaluasi tersebut umumnya dibahas dalam rapat sekolah untuk menyampaikan temuan pengawas dan merumuskan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah".

Pemantauan yang dilakukan oleh pengawas mencakup dua aspek utama yaitu supervisi terhadap proses akademik di kelas dan manajemen sekolah secara keseluruhan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas melakukan evaluasi melalui supervisi akademik dan supervisi manajerial. Hasil dari supervisi tersebut kemudian dibahas dalam forum komunitas belajar sekolah untuk memastikan adanya perbaikan kualitas pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus".

Intensitas kunjungan pengawas ke ruang kelas secara langsung menjadi metode evaluasi yang paling sering diterapkan untuk melihat interaksi riil guru dan siswa, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru 1, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas melakukan evaluasi dengan cara sering masuk ke dalam kelas dan berkunjung ke sekolah secara rutin. Dalam kunjungan tersebut, banyak hal

yang dibicarakan berkenaan dengan penanganan siswa inklusi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan mereka".

Pemeriksaan dokumen administrasi dan observasi terhadap perkembangan individu siswa inklusi merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus monitoring bulanan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Proses evaluasi dan monitoring dilakukan melalui observasi kelas, pemetaan, pemeriksaan administrasi pembelajaran serta diskusi mengenai perkembangan siswa inklusi. Guru kemudian melakukan umpan balik dan menjalankan rekomendasi pengawas berupa perbaikan strategi mengajar dan penyesuaian asesmennya".

Kesiapan sekolah dan kompetensi guru dalam mengelola fasilitas inklusi menjadi objek penilaian utama dalam mengidentifikasi kelemahan program, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Proses monitoring dan evaluasi pengawas meliputi pengumpulan data observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen untuk menilai kesiapan sekolah, kompetensi guru, fasilitas, dan kemajuan sistem inklusi. Guru sangat menerima umpan balik dan rekomendasi dari pengawas sebagai bagian penting dari pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pengajaran".

Aktivitas tanya jawab secara spontan saat proses belajar mengajar berlangsung menjadi salah satu cara pengawas untuk memonitor penerimaan siswa inklusi di lingkungan kelas, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru 1, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas melakukan monitoring dengan cara masuk ke kelas saat proses belajar berlangsung dan melakukan tanya jawab langsung dengan anak-anak



inklusi untuk melihat sejauh mana mereka dapat mengikuti pembelajaran".

Kenyataan yang ditemukan selama proses pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi masih sering terkendala oleh terbatasnya waktu pengawas dalam mendalami kasus setiap siswa secara individual. Hasil observasi memperlihatkan bahwa meskipun monitoring rutin dilakukan, instrumen evaluasi yang digunakan terkadang masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu memotret kemajuan fungsional siswa inklusi secara mendetail. Fakta ini menegaskan bahwa permasalahan evaluasi dan monitoring bukan hanya soal frekuensi kunjungan, melainkan perlunya penajaman alat ukur yang lebih spesifik terhadap indikator keberhasilan pendidikan inklusi di lapangan.

Solusi Evaluasi dan Monitoring Dalam Pelaksanaan Pendampingan Pengawas Sekolah Dalam Membantu Guru Sekolah Dasar Menangani Siswa Inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

Penyelesaian hambatan dalam kegiatan evaluasi dan monitoring memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan pembinaan berkelanjutan serta pemanfaatan instrumen penilaian yang lebih spesifik. Fokus utama solusi ini diarahkan pada peningkatan frekuensi pendampingan tatap muka, pemberian umpan balik yang konstruktif bagi guru, serta penguatan koordinasi antara pengawas dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa setiap hasil pemantauan dapat segera diimplementasikan dalam bentuk perbaikan layanan pembelajaran bagi siswa inklusi.

Pembinaan yang intensif dari pihak pengawas dianggap sebagai langkah efektif untuk menyempurnakan kualitas pengajaran di kelas inklusi, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Pengawas Sekolah, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas memberikan bimbingan kepada guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi, memotivasi guru untuk terus belajar dan berinovasi dalam menangani siswa inklusi, memberikan masukan dan saran perbaikan berdasarkan hasil observasi kelas dan diskusi dengan guru."

Upaya kolaboratif melalui diskusi temuan supervisi menjadi sarana untuk merumuskan langkah nyata perbaikan di tingkat satuan pendidikan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Evaluasi kinerja guru dilakukan melalui supervisi akademik dan manajerial, yang hasilnya kemudian dibahas bersama dalam rapat sekolah untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah."

Pemberian rekomendasi teknis mengenai penyesuaian strategi mengajar sangat membantu guru dalam mengatasi kendala asesmen siswa di lapangan, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Marabahan 3, yang mengatakan bahwa:

"Guru melakukan umpan balik dan menjalankan rekomendasi pengawas berupa perbaikan strategi mengajar dan penyesuaian asesmennya setelah proses monitoring dilakukan melalui observasi kelas dan pemeriksaan administrasi."

Forum komunitas belajar di sekolah dimanfaatkan sebagai wadah transformasi hasil evaluasi pengawas menjadi kompetensi praktis bagi seluruh tenaga pendidik, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Hasil dari supervisi tersebut kemudian dibahas dalam forum komunitas belajar sekolah untuk memastikan adanya perbaikan kualitas pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus."

Penerimaan guru terhadap saran perbaikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan program monitoring dalam meningkatkan profesionalisme pendidik, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Ulu Benteng 4, yang mengatakan bahwa:

"Guru sangat menerima umpan balik dan rekomendasi dari pengawas sebagai bagian dari pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pengajaran setelah proses pengumpulan data observasi dan pemeriksaan dokumen."

Kunjungan rutin dan komunikasi personal secara tatap muka antara pengawas dan guru terbukti efektif dalam memecahkan masalah penanganan siswa secara cepat, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Kepala Sekolah SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas membantu dengan cara sering masuk ke dalam kelas dan berkunjung ke sekolah, di mana banyak hal yang dibicarakan berkenaan dengan penanganan siswa inklusi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan mereka."

Interaksi langsung pengawas dengan siswa saat monitoring memberikan gambaran riil bagi guru mengenai cara berkomunikasi yang tepat dalam suasana belajar inklusif, hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh Guru SDN Antar Baru I, yang mengatakan bahwa:

"Pengawas melakukan monitoring dengan cara masuk ke kelas saat proses belajar berlangsung dan melakukan tanya jawab langsung dengan anak-anak inklusi, lalu memberikan pembinaan kepada guru mengenai cara penanganannya."

Berdasarkan hasil observasi, guru-guru menjadi lebih percaya diri dalam mengajar setelah mendapatkan instruksi praktis dan peragaan langsung dari pengawas di dalam kelas. Kehadiran fisik pengawas yang tidak sekadar memeriksa kertas kerja tetapi turun tangan memberikan contoh interaksi dengan siswa inklusi terbukti mampu memecahkan kebuntuan metode

pengajaran yang dialami guru. Langkah-langkah solutif ini memberikan dampak nyata pada perubahan atmosfer kelas yang menjadi lebih kondusif dan responsif terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus.

Pembahasan

Permasalahan pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah dalam membantu guru sekolah dasar menangani siswa inklusi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mencerminkan ketidaksesuaian antara rencana dan praktik lapangan yang kompleks. George R. Terry (dalam Dewi Sahal, 2025, hlm. 3) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan melalui sumber daya manusia dan material, prinsip ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan gagal mencapai efektivitas karena kurangnya pengorganisasian kunjungan rutin dan penggerakan guru melalui supervisi akademik yang intensif. Anwar (2020, hlm. 9) menekankan manajemen sebagai pengaturan aktivitas organisasi agar elemen bergerak sesuai tujuan, kondisi di Marabahan justru menampilkan ketidakteraturan jadwal pendampingan yang menyebabkan guru kesulitan mengadaptasi strategi pembelajaran inklusi secara berkelanjutan. Sarnoto (2020, hlm. 56) menyatakan supervisi sebagai bantuan pengembangan keterampilan profesional guru untuk meningkatkan metode pengajaran, realitas lapangan memperlihatkan pengawas terjebak pada pengawasan administratif daripada bimbingan teknis langsung di kelas yang mendukung penanganan siswa inklusi.

Permasalahan kompetensi dan pemahaman dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menyoroti kesenjangan pedagogik guru terhadap karakteristik siswa inklusi. Putri Hamdan (2021) menggunakan teori kompetensi guru yang menunjukkan hubungan erat antara sikap dan kemampuan guru dalam pendidikan inklusi sekolah dasar, temuan ini selaras dengan keterbatasan pemahaman guru Marabahan



dalam diferensiasi pembelajaran dan asesmen adaptif akibat latar belakang pendidikan non-khusus. Sarnoto (2020, hlm. 56) menggarisbawahi supervisi sebagai fasilitasi analisis masalah pembelajaran oleh pengawas untuk memotivasi guru menangani siswa inklusi efektif, namun di lapangan pendampingan lebih menekankan penguatan dasar daripada inovasi mendalam karena kurangnya pelatihan berkelanjutan. Aisyah Wiranata (2024, hlm. 83) membahas fungsi manajemen seperti perencanaan dan penggerakan yang harus membina kompetensi guru, situasi Marabahan menggambarkan kegagalan fungsi ini sehingga adaptasi kurikulum tetap seragam dan guru ragu berinovasi akibat faktor eksternal seperti stigma sosial.

Permasalahan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mengungkap ketidakterstrukturkan kerja sama antar pemangku kepentingan. Munajah et al. (2021) menerapkan teori implementasi kebijakan publik yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan birokrasi untuk keberhasilan inklusi sekolah dasar, prinsip ini terbukti relevan dengan koordinasi parsial di Marabahan yang bergantung inisiatif individu tanpa mekanisme lintas profesi. Ifrocha et al. (2025) menganalisis teori kolaborasi pendidikan antara guru pendamping khusus dan reguler untuk kesuksesan belajar siswa inklusi, kondisi lapangan menampilkan keterlibatan terapis situasional dan sinkronisasi data kebutuhan siswa yang tidak sistematis sehingga respons masalah lambat. Kinanthi et al. (2024) menggunakan teori manajemen pendidikan untuk menyoroti perencanaan strategis dan koordinasi pemangku kepentingan dalam inklusi sekolah dasar, realitas Marabahan memperkuat temuan ini melalui komunikasi informal rapat sporadis yang menghambat kolaborasi holistik sekolah-keluarga.

Permasalahan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di

Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menekankan ketidakcukupan infrastruktur pendukung inklusi. Kriswanto et al. (2023) menerapkan teori pendidikan inklusi dan manajemen sekolah yang mengidentifikasi ketersediaan sarana sebagai faktor penghambat, selaras dengan ketiadaan jalur landai, toilet disabilitas, dan media adaptif di sekolah Marabahan yang membatasi mobilitas siswa. Aisyah Wiranata (2024, hlm. 3) membahas unsur manajemen seperti machines dan money untuk efisiensi organisasi, minimnya pendanaan di lapangan menghalangi pengadaan fasilitas sehingga pengawas terfokus rekomendasi administratif ke dinas daripada solusi cepat. Rizqianti et al. (2022) menggunakan teori profesionalisme tenaga pendidik yang menyoroti minimnya fasilitas sebagai kendala guru pembimbing khusus, situasi ini memperberat guru Marabahan dalam pembelajaran harian karena infrastruktur konvensional menghambat partisipasi aktif siswa inklusi.

Permasalahan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menggambarkan ketergantungan pada pendekatan umum tanpa spesifikitas inklusi. Sagala (dalam Nasution et al., 2023, hlm. 20) menjelaskan supervisi pendidikan sebagai bimbingan sesuai kebutuhan guru untuk peningkatan mutu pembelajaran, namun monitoring lapangan terbatas kunjungan periodik dan pemeriksaan dokumen tanpa instrumen individual siswa. Maulana (2024, hlm. 15) mendefinisikan supervisi sebagai pendampingan profesional pengembangan kognitif-afektif-psikomotorik guru, beban kerja pengawas di Marabahan membatasi analisis holistik sehingga umpan balik kurang mendalam terhadap proses akademik-sosial siswa. Illahi (2020, hlm. 2) memposisikan supervisi sebagai instrumen manajemen pembelajaran efektif, tindak lanjut rapat sekolah yang bergantung kesiapan guru menunjukkan evaluasi administratif gagal mengubah praktik konsisten di kelas inklusi.

Solusi permasalahan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala menekankan pendekatan supervisi intensif tatap muka. Sarnoto (2020, hlm. 56) mengusulkan supervisi sebagai umpan balik konstruktif untuk perbaikan pengajaran, penerapan kunjungan rutin dengan peragaan interaksi siswa meningkatkan kepercayaan diri guru dalam strategi adaptif seperti yang terbukti di observasi lapangan. Kriswanto et al. (2023) merekomendasikan monitoring berkala melalui kolaborasi guru-GPK-orang tua, forum komunitas belajar sekolah di Marabahan memastikan transformasi rekomendasi menjadi praktik melalui diskusi hasil supervisi bersama kepala sekolah. Maulana (2024, hlm. 15) menargetkan supervisi pada pengembangan profesional berkelanjutan, pembinaan ini mengubah evaluasi menjadi pembelajaran kolektif yang mendorong perubahan nyata kualitas pengajaran inklusif holistik.

Permasalahan pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala sejalan dengan temuan Munajah et al. (2021) yang menganalisis implementasi kebijakan inklusi sekolah dasar melalui teori kebijakan publik menekankan komunikasi dan sumber daya, kondisi lapangan menunjukkan kesamaan kurangnya pelatihan pendampingan dan ketidakefektifan program inklusi akibat minimnya supervisi rutin. Thufail Bakhtiar (2023) menggunakan teori peran guru pendamping khusus dalam studi kasus sekolah dasar inklusi mengonfirmasi keterbatasan strategi adaptif guru seperti di Marabahan di mana pengawas gagal mengorganisasi kunjungan berkelanjutan sesuai fungsi manajemen George R. Terry (dalam Dewi Sahal, 2025, hlm. 3). Yaasmin (2024) menerapkan teori manajemen kurikulum inklusif melalui literature review memperkuat ketidakteraturan jadwal pendampingan di Marabahan yang menghambat adaptasi kurikulum, mirip dengan minimnya integrasi pendekatan inklusif dalam perencanaan sekolah dasar.

Temuan kompetensi dan pemahaman guru di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala selaras dengan Putri Hamdan (2021) yang menemukan hubungan sikap-kompetensi guru melalui metode kuantitatif di sekolah dasar percontohan, keterbatasan diferensiasi pembelajaran dan asesmen adaptif guru Marabahan mencerminkan kurangnya pelatihan khusus seperti yang disoroti Sarnoto (2020, hlm. 56) dalam supervisi pengembangan profesional. Rizqianti et al. (2022) menganalisis profesionalisme guru pembimbing khusus secara kualitatif deskriptif di Surabaya menegaskan beban kerja tinggi dan minim pelatihan yang memperberat guru Marabahan, sejalan dengan sikap ragu berinovasi akibat stigma sosial. Saskia et al. (2024) melalui studi literatur teori peran guru inklusi menguatkan variasi kompetensi GPK yang memengaruhi efektivitas pendampingan, kondisi ini terulang di Marabahan di mana pengawas gagal menggerakkan fungsi manajemen untuk pembinaan berkelanjutan.

Koordinasi dan kolaborasi di Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala konsisten dengan Kinanthi et al. (2024) yang menggunakan teori manajemen pendidikan kualitatif studi pustaka untuk mengidentifikasi minimnya perencanaan strategis pemangku kepentingan dalam inklusi sekolah dasar, komunikasi informal rapat sporadis mirip kurangnya sinergi pengawas-guru-orang tua. Ifrocha et al. (2025) menganalisis teori kolaborasi pendidikan kualitatif deskriptif pada kesulitan membaca siswa inklusi menyoroti kurangnya koordinasi guru pendamping-reguler yang terlihat di Marabahan melalui keterlibatan terapis situasional tidak sistematis. Teori pendampingan guru inklusi mengonfirmasi kurangnya sinkronisasi data kebutuhan siswa seperti respons lambat masalah di Marabahan, memperkuat kebutuhan mekanisme lintas profesi.



KESIMPULAN

Pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah di Kecamatan Marabahan menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kompetensi guru, minimnya sarana prasarana ramah disabilitas, serta belum adaptifnya kurikulum penunjang siswa inklusi. Lemahnya koordinasi antarpihak, instrumen evaluasi yang masih bersifat administratif, serta minimnya keterlibatan tenaga ahli turut memperlambat efektivitas pelayanan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Solusi penguatan mutlak diarahkan pada peningkatan kapasitas pedagogik guru melalui supervisi tatap muka secara intensif, pembentukan forum komunitas belajar yang terstruktur, pemetaan prioritas advokasi anggaran sarana prasarana, serta penerapan instrumen monitoring berbasis perkembangan individual siswa secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aisyah, S., & Wiranata, R. (2024). *DASAR-DASAR MANAJEMEN; Teori dan Praktek Dalam Organisasi & Pendidikan*. Nas Media Pustaka.
- Anwar, M. (2020). *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen*. Prenada Media.
- Dewi, A. D. M., & Sahal, Y. F. D. (2025). The Perspective of Islamic Education Management is Seen from The Management of George R. Terry. *An-Nuha: Jurnal Sosial & Humaniora*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.63005/annuha.v3i1.1>
- Ifrocha, T., Subiyantoro, S., & Santosa, E. B. (2025). The Collaborative Role of Special Assistance Teachers with Regular Teachers on the Learning Success of Students with Early Reading Difficulties in Inclusive Elementary School. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 8(1).
- Illahi, T. (2020). *Supervisi Pendidikan*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9mqm>
- Kinanthi, T. K., Wardani, D. K., Sarie, A. C., & Marini, A. (2024). Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3).
- Kriswanto, D., Suyatno, & Sukirman. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan. *Jurnal Basicedu*, 7(5).
- Maulana, O. (2024). Analisis Peran Supervisi Pendidikan Dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru. *Jurnal Insan Cendekia*, 5(2), 14–26. <https://doi.org/10.54012/jurnalinsancendekia.v5i2.548>
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3).
- Nasution, I., Safitri, M., Halawa, S., Zuchairunnisa, Z., Khotimah, N., & Ramadhan, S. (2023). Peranan Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Sublim: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 17–26. <https://doi.org/10.33487/sublim.v1i1.5606>
- Oktaviani, E. D. (2020). Peranan Guru Dalam Pendidikan Inklusif Untuk Pencapaian Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(1), 55. <https://doi.org/10.32585/jkp.v4i1.440>
- Prayoga, G., Pramesti, Y., Fathurohim, F., & Aniroh, A. (2025). Pendampingan Guru Madrasah Ibtidaiyah dalam Implementasi Pembelajaran Diferensiasi untuk Siswa Berkebutuhan Khusus. *JMIMAS: Jurnal Pengabdian Dan Mitra Masyarakat*, 1(2).
- Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2).
- Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, 5(1), 77. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>
- Rilci, A., Nugraha, B. T., & Gusmaneli. (2024). Pendidikan Inklusif: Mengakui Keberagaman dan Membangun Kesetaraan. *Journal Educational Research and Development | E-ISSN: 3063-9158*, 1(2), 41–43. <https://doi.org/10.62379/jerd.v1i2.39>
- Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1).
- Sanga, L. D., & Wangdra, Y. (2023). Pendidikan Adalah Faktor Penentu Daya Saing Bangsa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi*

(SNISTEK), 5, 84–90.
<https://doi.org/10.33884/psnistek.v5i.8067>

Sarnoto, A. Z. (2020). Urgensi Supervisi Pengajaran Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru. *Jurnal Statement : Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 2(2), 55–66.
<https://doi.org/10.56745/js.v2i2.22>

Saskia, Y., Suriansyah, A., & Rafianti, W. R. (2024). Peran Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(4).

Thufail, D. F., & Bakhtiar, A. M. (2023). Pentingnya Peran Guru Pendamping Khusus bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Kelas Inklusi Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3).

Yaasmin, L. S. (2024). Mengoptimalkan Manajemen Kurikulum untuk Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Papeda*, 6(3).